



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

*Perangkat Daerah
Tahun 2025 - 2029*





BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR **48** TAHUN 2025

TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan untuk mewujudkan sinergitas pelaksanaan pembangunan, perlu perencanaan pembangunan daerah dalam satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional yang disusun secara berjenjang oleh Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah;
- b. bahwa untuk mewujudkan satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional, perlu menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan subkegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMD Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
2. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
3. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Bupati adalah Bupati Bantul.
7. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, dan subkegiatan pembangunan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029.
- (3) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah tahun 2026 sampai dengan tahun 2030.

Pasal 3

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika:
BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB V : PENUTUP
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul

pada tanggal 19 September 2025

BUPATI BANTUL,



ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul

pada tanggal 19 September 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,



AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 NOMOR 51

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR ⁴⁸ TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

Rencana Strategis (Renstra)
**Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan,
dan Aset Daerah**
Kabupaten Bantul
Tahun 2025-2029

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Rencana Perangkat Daerah salah satunya adalah Renstra Perangkat Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut maka disusunlah Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan/sub kegiatan, target indikator kinerja dan pagu dana indikatif serta sumber-sumber pembiayaan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah dan berpedoman kepada RPJMD.

Dengan adanya kewajiban dari setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Renstra Perangkat Daerah ini, maka akan menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Dengan adanya Renstra, diharapkan sistem akuntabilitas instansi pemerintah dapat dikembangkan. Akuntabilitas yang merupakan sistem pertanggungjawaban dari seseorang yang diberi wewenang kepada yang memberi wewenang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance). Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategik merupakan langkah pertama yang harus dilaksanakan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan perubahan lingkungan strategik lokal, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan

pendekatan strategik yang jelas dan sinergis. Melalui dokumen renstra tersebut akan menjadi pedoman dan arahan yang jelas bagi BPKPAD selama kurun waktu lima tahun (tahun 2025-2029) dalam menyelenggarakan tugas, pokok dan tata kerja selaku organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan pelayanan Pemerintah Daerah pada aspek pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan urusan yang ditangani untuk mendukung tercapainya indikator kinerja dari sasaran daerah yang menjadi tanggungjawab BPKPAD dan indikator kinerja dari sasaran yang telah ditetapkan sebagai indikator kinerja utama guna terwujudnya tujuan akhir dari makna yang dikandung dalam visi dan misi yang telah ditetapkan pada akhir periode perencanaan. Selain itu juga sebagai pedoman dalam penyusunan program kerja tahunan, penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah pada BPKPAD.

Terkait dengan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 telah mengatur bahwa RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029. RPJMD tersebut merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan sebagai penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah.

Berdasarkan peraturan yang berlaku mengenai perencanaan daerah, maka Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Bantul sebagai salah satu Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul juga menyusun dan menetapkan Renstra BPKPAD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bantul tahun 2025-2029. Selanjutnya Renstra BPKPAD yang ditetapkan harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renja BPKPAD yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dan penjabaran dari perencanaan periode 5 (lima) tahunan.

Dalam pelaksanaan tahun anggaran 2024 Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Sedangkan Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah.

Tugas pokok Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah adalah membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan, antara lain :

- a. Penyusunan program kerja Badan;
- b. Pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan;
- c. Penyusunan kebijakan teknis bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset;
- d. Pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan anggaran daerah;
- e. Pengoordinasian penyelenggaraan perbendaharaan umum daerah;
- f. Pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah;
- g. Pengoordinasian pelaksanaan pendataan, pelayanan dan penetapan pajak daerah;
- h. Pengoordinasian pelaksanaan penagihan, pengembangan dan pengawasan pendapatan daerah;
- i. Penyusunan Rancangan APBD dan Pertanggungjawaban APBD;
- j. Pelaksanaan fungsi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
- k. Pelaksanaan fungsi Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah;
- l. Pelaksanaan pembinaan administrasi keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
- m. Pembinaan teknis penyelenggaraan bidang pendapatan, anggaran, belanja, akuntansi serta Barang Milik Daerah;
- n. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Badan;

- o. Pengoordinasian pengelolaan data dan informasi Badan;
- p. Pengoordinasian tugas dan fungsi satuan organisasi Badan;
- q. Pengoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional pada Badan;
- r. Pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, kearsipan, dan perpustakaan, serta budaya pemerintahan pada Badan;
- s. Pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Badan;
- t. Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Badan; dan
- u. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Oleh sebab itu dalam pelaksanaan kegiatan BPKPAD harus sejalan dengan Renstra PD Tahun 2025-2029 dan sejalan dengan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025 – 2029.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan RPJMD Kabupaten Bantul 2025-2029, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang - Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
17. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172).
18. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
19. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);

27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021;
28. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
29. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 10);
30. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2021 tentang Grand Design Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2042 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 131);
31. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 13);
32. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2023 tentang Strategi Pengembangan Wilayah Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Satuan Ruang Kadipaten Tahun 2023- 2043 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 9);
33. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 52; Tambahan Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52)
34. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2024 tentang Sistem dan Prosedur Keuangan Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 43; Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43)
35. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 2);

36. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 173);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 180); dan
39. Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 49).

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra BPKPAD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang menjabarkan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 sesuai dengan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada BPKPAD Kabupaten Bantul yang tercantum dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra BPKPAD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 adalah sebagai pedoman dalam penyusunan Renja BPKPAD, penguatan peran para stakeholders dalam pelaksanaan

pengelolaan pendapatan, keuangan dan barang daerah, serta sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan BPKPAD Kabupaten Bantul.

1.4.Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Renstra BPKPAD Kabupaten tahun 2025-2029 menguraikan pokok bahasan dengan susunan garis besar sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang, bagian ini mengemukakan secara ringkas pengertian, fungsi renstra, proses penyusunan Renstra, keterkaitan Renstra dengan dokumen perencanaan lain dan Sejarah PD

1.2 Dasar Hukum, bagian ini memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah atau peraturan terkait dengan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, peraturan tentang struktur organisasi Perangkat Daerah serta peraturan tentang tugas, fungsi dan kewenangan Perangkat Daerah

1.3 Maksud dan Tujuan, bagian ini memuat penjelasan mengenai maksud dan tujuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan, bagian ini menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DA ISU STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah, memberikan informasi pelaksanaan pelayanan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah beserta jenis layanan yang diberikan

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah, memberikan identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah sehingga muncul Isu

Strategis Perangkat Daerah yang menunjang Isu Strategis
Pemerintah Kabupaten Bantul

BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan yang akan di lakukan
Perangkat
Daerah

BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELNGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan, Sub kegiatan yang akan
digunakan oleh Perangkat Daerah guna melakukan
kinerja

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Urusan

BAB V. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah merupakan salah satu Perangkat Daerah unsur penunjang urusan pemerintahan yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan. Dimana dalam melaksanakan tugas tersebut salah satu fungsi yang diselenggarakan adalah penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Tugas pokok dari Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul seperti yang tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah adalah membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan. Dan dalam melaksanakan tugasnya, Badan Keuangan dan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis bidang pengelolaan keuangan, pendapatan, dan aset;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pengelolaan keuangan, pendapatan, dan aset;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pengelolaan keuangan, pendapatan, dan aset;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi bidang pengelolaan keuangan, pendapatan, dan aset;
- e. pelaksanaan administrasi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

BPKPAD dipimpin oleh Kepala yang memiliki fungsi sebagai :

1. Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;

2. Pembina Pengelola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
3. Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah;
4. Pengguna anggaran; dan
5. Pengguna barang.

Dalam menyelenggarakan fungsi tersebut diatas, BPKPAD memiliki enam (6) bidang dan satu (1) Sekretariat, dengan tugas masing-masing bidang yaitu :

1. Bidang Pelayanan dan Penetapan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi, dan fasilitasi penyelenggaraan pelayanan, pendataan dan penetapan pajak daerah.
2. Bidang Penagihan, Pengembangan dan Pemeriksaan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi pelaksanaan penagihan, pengembangan, dan pemeriksaan pendapatan daerah
3. Bidang Anggaran mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi pengelolaan anggaran daerah
4. Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan perbendaharaan umum daerah.
5. Bidang Akuntansi mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi pelaksanaan akuntansi dan dukungan teknis bidang akuntansi.
6. Bidang Aset mempunyai tugas melaksanakan tugas perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi pengelolaan barang milik daerah.
7. Sekretariat mempunyai tugas kesekretariatan pengkoordinasian pelaksanaan tugas satauan oarganisasi di lingkungan BPKPAD.

Dukungan sumber daya manusia, sarana-prasarana dan anggaran pada tahun 2024 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi jabatan, Jenis Kelamin dan Kometensi

No	Jabatan	Formasi						Pegawai yang ada						Jenis Kelamin	
		Jml	Kualifikasi					Jml	Kualifikasi					Laki	Peremp
			S2	S1	D3	SMA	SMP		S2	S1	D3	SMA	SMP		
1	2	3	4					5	6					7	8
A.	Jabatan Pimpinan Tinggi	1	1					1	1					1	
B.	Jabatan Administrasi														
	1. Administrator	6	6					6	3	3				5	1
	2. Pengawas	14		14				14	4	10				6	8
	3. Pelaksana	98	1	47	22	26	2	66	1	28	16	19	2	38	28
C.	Jabatan Fungsional	49	1	31	17	0	0	11		4	7			4	7
	Jumlah	168	9	92	39	26	2	98	9	45	23	19	2	54	44

Sumber: LKj BPKPAD TA 2024

Dalam upaya meningkatkan tata kelola bidang pendapatan, bidang keuangan dan aset daerah BPKPAD telah memanfaatkan teknologi informasi yaitu dengan mempergunakan sistem manajemen informasi yang terintegrasi dalam melaksanakan tata kelola keuangan dan aset daerah yaitu antara lain Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) milik Kementrian Dalam Negeri, Aplikasi Sistem Data Transaksi Keuangan daerah (SIDAT KEUDA), Aplikasi Data Transaksi Harian (DTH), Aplikasi Pajak Daerah (SmartGov dan CitiGov), Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD), Aplikasi Layanan Aplikasi Pajak Bantul (LAPak BANTUL), Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset (SIMAS), Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Persediaan dan Aset Daerah (SIMPERSADA), Sistem Elektronik Perencanaan, Penganggaran dan Informasi Kinerja Terintegrasi (sep@kat).

Dalam menganalisa kinerja pelayanan BPKPAD selama periode Rencana Strategis (Renstra) tahun 2025-2029 yaitu dengan mengukur capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai alat ukur spesifik secara kuantitatif

dan/atau kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran dan hasil yang menggambarkan tingkat capaian kinerja program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Capaian atas Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai indikator kinerja dari sasaran daerah yang tercantum dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026, yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.2
Inikator Kinerja Utama (IKU) BPKPAD

Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Sasaran PD	Indikator Tujuan dan Sasaran	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan bebas KKN			Indeks Reformasi Birokrasi												
	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel		3. Opini Laporan Keuangan	n/a	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan barang milik daerah	Berkurangnya catatan hasil pemeriksaaa n BPK atas LKPD tahun n-1	n/a	2	n/a	6	6	3	5	7	5	4	4	2
		Meningkatnya kemampuan keuangan daerah	Presentase PAD terhadap pendapatan daerah	n/a	22,79	17	21,99	21,69	23,91	22,19	24,31	22,69	24,47	23,19	

Sumber : BPKPAD Tahun 2025

Tabel sebagaimana tersebut diatas menunjukkan pencapaian indikator kinerja utama BPKPAD sebagai berikut:

1. Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah yaitu Opini pemeriksaan BPK

Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel merupakan sasaran utama dari kinerja pelayanan pada sektor pengelolaan keuangan daerah. Ukuran keberhasilan atau kegagalan dari kinerja pelayanan pada sektor ini adalah dengan diraihnya opini BPK RI atas Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LHP LKPD). Pemberian opini tersebut sebagai bentuk apresiasi dari BPK atas hasil pemeriksaan laporan keuangan yang telah disusun oleh Pemerintah Daerah. LKPD sebagai media akuntabilitas atas sistem manajemen keuangan daerah yang disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) meliputi sistem perencanaan dan penganggaran, sistem pelaksanaan anggaran, sistem akuntansi keuangan daerah dan sistem pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang memenuhi unsur-unsur pengendalian internal dan menjamin kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Opini WTP telah diraih oleh Pemerintah Kabupaten Bantul selama 13 (tiga Belas) kali berturut-turut sejak LKPD tahun 2012 sampai dengan 2024. Diraihnya opini WTP tersebut sebagai ukuran/indikator bahwa Pemerintah Kabupaten Bantul dalam melaksanakan tata kelola keuangan daerah semakin memperhatikan tingkat akuntabilitas dan LKPD telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektifitas sistem pengendalian intern.

2. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah pertama, yaitu Berkurangnya Catatan Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD Tahun n-1

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan Laporan yang wajib disusun oleh Pemerintah Daerah dalam mengakhiri kinerja atau pelaksanaan kegiatan pada akhir tahun. Pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas LKPD tahun n-1 dilakukan pada awal januari tahun n sampai dengan bulan maret tahun n. Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI ini terdapat opini atas LKPD serta

efektifitas sistem pengendalian intern. Pengukuran IKU pertaman ini dapat dilakukan dengan cara menghitung tindak lanjut atas temuan LHP BPK RI yang sudah dilakukan Pemerintah Kabupaten Bantul pada tahun n-1 atas LHP BPK RI Tahun n-2. IKU ini bertujuan agar dalam melakukan kinerja Pemerintah Daerah yang akuntabel, dan tidak terdapat temuan yang berulang dan menyebabkan Opini atas Pemeriksaan keuangan mengalami penurunan.

3. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Ke dua, yaitu Presentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah.

Persentase PAD terhadap pendapatan daerah dipergunakan untuk menginformasikan kontribusi atau peranan pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah. Pendapatan Asli daerah (PAD) terdiri dari :

1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
4. Lain-lain PAD yang sah

Selama tahun 2020 s/d 2024 persentase PAD terhadap pendapatan daerah terendah dicapai tahun 2021 yaitu sebesar 21,99% dan tertinggi dicapai tahun 2024 yaitu sebesar 24,47%. Dari tabel diatas dapat digambarkan presentase PAD terhadap Pendapatan Daerah terus mengalami peningkatan di setiap tahun nya. Hal ini memberikan dampak positif bagi Kabupaten Bantul untuk melakukan peningkatan kemandirian fiskal guna menunjang kegiatan dan pembangunan di wilayah Kabupaten Bantul.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1. Permasalahan Perangkat Daerah

BPKPAD mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan. Dalam rancangan RPJMD Tahun 2025-2029, BPKPAD berupaya menyelesaikan permasalahan daerah, yaitu :

Tabel 2.3
Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Urusan Pemerintah Daerah

No	Urusan	Permasalahan
1	Unsur Pendukung Urusan Pemerintah Daerah	a. Belum optimalnya Indeks Reformasi Birokrasi (didalamnya terdapat Opini BKP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) b. Belum optimalnya nilai LPPD, dimana pada tahun 2023 masih peringkat 84 secara nasional (didalam nya BPKPAD mendukung beberapa IKK)
2	Unsur Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	a. Jumlah Pendapatan Daerah pada tahun 2024 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, namun caaiannya masih lebih rendah dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2022 yang mencapai 2.260.577.439.195,54 b. Belum optimalnya Presentase PAD terhadap Pendapatan Daerah

Sumber : RPJMD Kabupaten Bantul 2026-2029

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BPKPAD memiliki beberapa permasalahan yang dihadapi diantaranya sebagai berikut :

- a. Pengelolaan Keuangan belum optimal
- b. Pengelolaan Barang Milik Daerah belum optimal
- c. Pengelolaan Pendapatan Daerah belum optimal

Dari permasalahan-permasalahan tersebut jika diidentifikasi akan menghasilkan peta permasalahan pelayanan perangkat daerah sebagai berikut :

Tabel 2.4
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
Belum maksimalnya capaian Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Lambatnya proses pengolahan data laporan keuangan	Belum sesuai penerapan kode rekening
		Belum adanya desk pengendalian anggaran
		Tidak adanya aplikasi pendamping SIPD dalam mengolah laporan keuangan
	Realisasi keuangan tidak tepat waktu	Keterlambatan Perangkat Daerah dalam melengkapi persyaratan pencairan
	Lambatnya proses pengelolaan aset barang milik daerah	Belum teraturnya pencatatan barang milik daerah
	Kurang lengkapnya Data dan Informasi Pendapatan Daerah	Belum teridentifikasinya objek pajak baru
	Kurang intensifnya pemungutan pajak daerah	Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak
		Kurangnya Pengawasan dan Pemeriksaan dalam pemungutan pajak daerah

2.2.2. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu strategis daerah merujuk pada masalah atau tantangan yang dianggap krusial dan mempengaruhi perkembangan serta kesejahteraan suatu wilayah secara keseluruhan. Isu-isu ini penting karena dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, ekonomi, lingkungan, dan kelembagaan di dalamnya. Isu strategis mencakup kondisi yang memiliki potensi untuk menjadimasaalah atau peluang bagi daerah di masa mendatang. Fokusnya lebih kearah masa depan, di mana hal-hal yang saat ini belum menjadi masalah tetapi memiliki potensi untuk menjadi masalah di kemudian hari, termasuk dalam kategori isu strategis. Selain itu, isu strategis juga dapat dilihat sebagai potensi daerah yang belum dimanfaatkan sepenuhnya, danjika dikelola dengan baik, dapat menjadi modal pembangunan yang penting.

Berdasarkan permasalahan pembangunan Kabupaten Bantul dan memperhatikan isu-isu di tingkat internasional, nasional, dan provinsi, dan hasil KLHS RPJMD, serta memedomani kebijakan pada RPJPD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045 khususnya tahap I (2025-2029), maka dapat

dirumuskan beberapa isu strategis Kabupaten Bantul, sebagai berikut:

1. Tingginya angka kemiskinan dan pengangguran
2. Kesenjangan Pendapatan
3. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM)
4. Desentralisasi pengelolaan sampah
5. Pembangunan Ketahanan pangan
6. Pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif
7. Pengembangan kawasan selatan
8. Restorasi gumuk pasir parangtritis
9. Reformasi birokrasi
10. Reformasi kalurahan
11. Pengelolaan limbah yang berdampak pada penurunan kualitas air
12. Percepatan penurunan Stunting
13. Kesenjangan Gender, Disabilitas dan Inklusi sosial
14. Pengendalian Inflasi Daerah
15. Tingginya kerawanan bencana
16. Tata nilai budaya istimewa Yogyakarta

BPKPAD perencanaan Renstra 2026-2029 dalam melaksanakan kinerja nya akan berpedoman pada perumusan Isu Strategis Perangkat Daerah yang bersumber dari Isu Startegis Daerah tersebut.

Tabel 2.5
Rumusan Isu Strategis PD

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Global	Isu Nasional	Isu Regional	Isu Strategis PD
1	2	3	4	5	6	7
Reformasi Birokrasi pada pengelolaan keuangan daerah	Belum maksimalnya capaian Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Tingginya Angka Kemiskinan dan kesenjangan Wilayah	Komitmen Sustainable Development Goals (SDGs)	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan	Percepatan penanggulangan kemiskinan	Mempertahankan Opini WTP Kualitas tata kelola barang milik daerah belum tertib

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Global	Isu Nasional	Isu Regional	Isu Strategis PD
1	2	3	4	5	6	7
Potensi wajib pajak daerah				penyelundupan		
			Revolusi Industri 4.0	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Penanganan dan pemulihan pasca pandemi COVID-19	Terdapat wajib pajak yang belum dilakukan pendataan
			Ketegangan Geopolitik Global			Kurang tertibnya masyarakat untuk membayar pajak daerah

BAB III

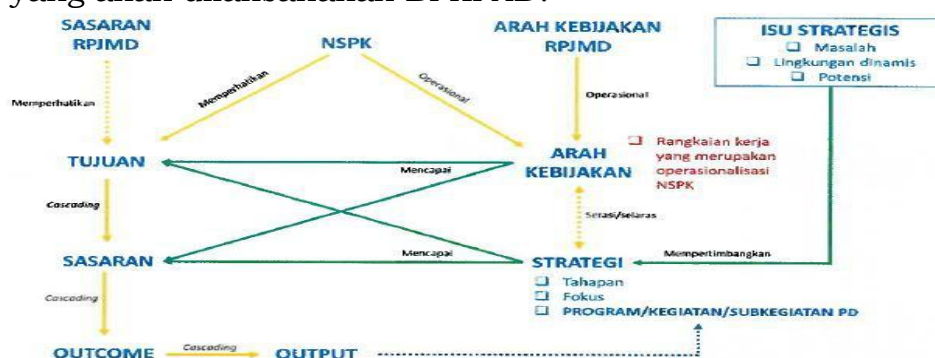
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran jangka menengah BPKPAD merupakan perumusan strategis yang memiliki prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja BPKPAD selama periode lima tahun (tahun 2025-2030) pada bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah sesuai dengan tujuan akhir dari visi dan misi yang telah ditetapkan diatas. Tujuan dan sasaran memiliki korelasi dengan pernyataan visi dan misi yang telah ditentukan oleh BPKPAD.

Tujuan adalah suatu kondisi yang terukur yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yang akan datang. Tujuan yang ditetapkan selain merupakan turunan secara lebih operasional dari masing-masing misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan memperhatikan visi, juga mengacu dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Sasaran disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah dan sasaran yang ditetapkan akan menjadi acuan dalam penetapan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan BPKPAD.



Sumber: Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2025

Gambar 3.1. Konsep Renstra PD 2025-2029

Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah BPKPAD disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1 Rumusan Tujuan dan Sasaran Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.02.0.00.0.00.01.0000 - Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah											
- Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Daerah yang Akuntabel, Bersih, Berbasis Digital dan Pelayanan Publik yang Profesional	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun N-1 (Indeks)	75.139	75.214	75.364	75.515	75.742	75.969	76.197	
			Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	0.81	0.90-0.96	0.91-0.97	0.92-0.98	0.93-0.99	0.94-1.00	0.95-1.01	
		Meningkatnya pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah	Persentase pengelolaan keuangan yang sesuai peraturan yang berlaku (%)	95.21	95.27	95.32	95.38	95.42	95.47	95.50	
			Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (Persentase)	24.47	24.54	25.11	25.69	26.02	26.36	26.70	
			Persentase akuntabilitas pengelolaan Barang Milik Daerah (%)	81.25	82.00	83.00	84.66	86.35	88.08	89.84	

3.2.Strategi dan Arah Kebijakan

- Strategi Renstra PD 2025-2029 merupakan rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD.
- Strategi Renstra PD berupa pentahapan pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Pentahapan Renstra PD dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.2 Pentahapan Renstra PD

Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5
Penguatan sistem penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan daerah ditunjang dengan pengelolaan aset yang handal serta penerimaan Pajak Daerah yang terus meningkat	Peningkatan realisasi pajak daerah dengan melakukan pendataan, pemutahiran basis data, serta penagihan piutang pajak	Peningkatan integrasi sistem penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan daerah dengan pendapatan daerah di sektor Pajak Daerah	Peningkatan pengelolaan aset yang handal melalui sensus barang milik daerah	Menciptakan pengawasan dan pengendalian penganggaran sampai dengan pelaporan keuangan daerah yang berkualitas dengan ditunjang pengelolaan aset dan penerimaan Pajak Daerah yang handal

- Arah kebijakan Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD.

Tabel 3.3 Rumusan Arah Kebijakan Renstra PD

No	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)
	Meningkatkan tata kelola anggaran, perbendaharaan, serta akuntansi dan pelaporan	Meningkatkan pengelolaan keuangan yang akuntabel	Melalui PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
			Melalui PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
	Meningkatkan tata kelola aset daerah	Meningkatkan pengelolaan Barang Milik Daerah yang akuntabel	Melalui PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

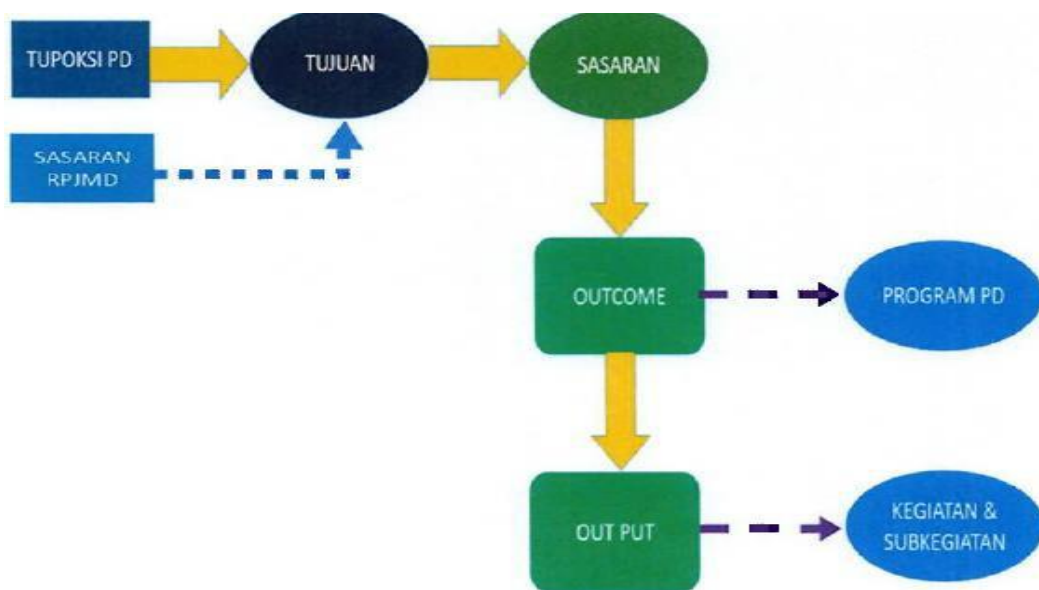
BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA

PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Program, Kegiatan, Subkegiatan

- Program, kegiatan dan subkegiatan mengacu pada nomerklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri dan pemutakhirannya.
- Program, kegiatan dan subkegiatan dirumuskan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD



Sumber: Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025

Gambar 4.1 Kerangka perumusan program, kegiatan, subkegiatan Renstra PD

- Program, kegiatan, subkegiatan yang disusun harus dapat menggambarkan keterkaitannya dengan tujuan dan sasaran Renstra PD.
- Program, kegiatan, subkegiatan dirumuskan dari Tahun 2026 sampai dengan tahun 2030. Perlu ditambahkan pernyataan eksplisit bahwa program, kegiatan, subkegiatan Tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan PD yaitu pijakan penyusunan Renja PD Tahun 2030

Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
							2026		2027		2028		2029		2030			
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Daerah yang Akuntabel, Bersih, Berbasis Digital dan Pelayanan Publik yang Profesional				Opini BPK	WTP	WTP	WTP		WTP		WTP		WTP		WTP			
	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel			Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun N-1	75,139	75,214	75,36		75,52		75,74		75,97		76,2		5.02.0.00.0.00.0 1.0000 - Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	
				Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	0,81	0,90-0,96	0,91-0,97		0,92-0,98		0,93-0,99		0,94-1,00		0,95-1,01		5.02.0.00.0.00.0 1.0000 - Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	
		Meningkatnya pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah		Prosentase pengelolaan keuangan yang sesuai peraturan yang berlaku	95,21	95,27	95,32		95,38		95,42		95,47		95,5		5.02.0.00.0.00.0 1.0000 - Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	
				Prosentase akuntabilitas pengelolaan Barang Milik Daerah	81,25	82	83		84,66		86,35		88,08		89,84		5.02.0.00.0.00.0 1.0000 - Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	
				Persentase PAD terhadap pendapatan daerah	24,47	24,54	25,11		25,69		26,02		26,36		26,7		5.02.0.00.0.00.0 1.0000 - Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	
			4.01 - SEKRETARIAT DAERAH					72.586.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		
			4.01.04 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN					72.586.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
							2026		2027		2028		2029		2030			
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Meningkatnya pengelolaan keuangan urusan keistimewaan yang berkualitas	Persentase Pengelolaan Keuangan Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	97	97,1	97.2	72.586.000,00	97.4	70.000.000,00	97.6	70.000.000,00	97.8	70.000.000,00	98	70.000.000,00	5.02.0.00.0.00.0 1.0000 - Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	
			4.01.04.5.06 - Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan					72.586.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		
			Terwujudnya Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Se-DIY	3	3	3	72.586.000,00	3	70.000.000,00	3	70.000.000,00	3	70.000.000,00	3	70.000.000,00		
			4.01.04.5.06.0002 - Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan					72.586.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		
			Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Se-DIY	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Se-DIY	3	3	3	72.586.000,00	3	70.000.000,00	3	70.000.000,00	3	70.000.000,00	3	70.000.000,00		
			5.02 - KEUANGAN					450.148.630.584,00		451.406.251.539,00		453.856.363.663,00		453.189.977.885,00		456.279.316.430,00		
			5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					55.658.108.492,00		77.786.778.368,00		78.208.984.148,00		78.094.151.882,00		78.626.509.801,00		
			Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	81.75	82,24	82.73	55.658.108.492,00	83.72	77.786.778.368,00	84.73	78.208.984.148,00	85.75	78.094.151.882,00	86.77	78.626.509.801,00	5.02.0.00.0.00.0 1.0000 - Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	
				Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	83.38	83,39	83.40		83.60		83.80		84.00		84.20			
			5.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					31.653.287,11		36.779.266,36		36.394.832,35		53.547.116,51		32.861.741,24		
			Terwujudnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6	10	12	31.653.287,11	12	36.779.266,36	12	36.394.832,35	12	53.547.116,51	12	32.861.741,24		
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	6	3		3		3		9		3			

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
							2026		2027		2028		2029		2030			
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0	0	1		1		1		2		1			
			5.02.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					9.495.986,13		11.316.697,34		11.457.632,41		15.749.151,91		10.345.362,98		
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	6	3	9.495.986,13	3	11.316.697,34	3	11.457.632,41	9	15.749.151,91	3	10.345.362,98		
			5.02.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					12.661.314,85		14.853.165,26		14.827.524,29		18.898.982,30		13.388.116,80		
			Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6	10	12	12.661.314,85	12	14.853.165,26	12	14.827.524,29	12	18.898.982,30	12	13.388.116,80		
			5.02.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					9.495.986,13		10.609.403,76		10.109.675,65		18.898.982,30		9.128.261,46		
			Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0	0	1	9.495.986,13	1	10.609.403,76	1	10.109.675,65	2	18.898.982,30	1	9.128.261,46		
			5.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					25.830.207.572,64		30.317.599.574,91		30.350.481.113,02		29.803.696.250,51		30.247.694.458,61		
			Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	143	143	143	25.830.207.572,64	143	30.317.599.574,91	143	30.350.481.113,02	143	29.803.696.250,51	143	30.247.694.458,61		
				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi	34	34	34		34		34		34		34			

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
							2026		2027		2028		2029		2030			
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD														
			5.02.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					25.476.161.124,83		29.886.440.387,25		29.902.653.995,75		29.347.440.778,61		29.767.282.032,40		
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	143	143	143	25.476.161.124,83	143	29.886.440.387,25	143	29.902.653.995,75	143	29.347.440.778,61	143	29.767.282.032,40		
			5.02.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					354.046.447,81		431.159.187,66		447.827.117,27		456.255.471,90		480.412.426,21		
			Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	34	34	34	354.046.447,81	34	431.159.187,66	34	447.827.117,27	34	456.255.471,90	34	480.412.426,21		
			5.02.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					175.992.276,35		207.838.219,59		209.370.371,77		206.915.762,82		211.370.744,38		
			Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0	0	100	175.992.276,35	100	207.838.219,59	100	209.370.371,77	100	206.915.762,82	100	211.370.744,38		
				Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	9	10	7		7		7		7		7			
				Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0	0	98		98		98		98		98			
			5.02.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					8.229.854,65		9.654.557,42		9.659.795,09		9.480.438,23		9.616.064,34		
			Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	9	10	7	8.229.854,65	7	9.654.557,42	7	9.659.795,09	7	9.480.438,23	7	9.616.064,34		

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
							2026		2027		2028		2029		2030			
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			5.02.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan					126.613.148,4 ₅		148.531.652,5 ₉		148.612.232,0 ₇		145.852.895,8 ₈		147.939.451, ₃₃		
			Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0	0	100	126.613.148,4 ₅	100	148.531.652,5 ₉	100	148.612.232,0 ₇	100	145.852.895,8 ₈	100	147.939.451, ₃₃		
			5.02.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					41.149.273,25		49.652.009,58		51.098.344,61		51.582.428,71		53.815.228,7 ₁		
			Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0	0	98	41.149.273,25	98	49.652.009,58	98	51.098.344,61	98	51.582.428,71	98	53.815.228,7 ₁		
			5.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah					1.340.105.216, ₄₇		1.577.668.202, ₇₂		1.591.408.941, ₃₃		1.599.283.736, ₆₆		1.603.496.99 _{0,40}		
			Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	45	37	36	1.340.105.216, ₄₇	38	1.577.668.202, ₇₂	40	1.591.408.941, ₃₃	42	1.599.283.736, ₆₆	44	1.603.496.99 _{0,40}		
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6	1	6		7		7		7		7			
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4	5	15		15		15		15		15			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	680	95	168		168		168		192		168			
				Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4	5	6		6		6		6		6			
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	15	14	16		16		16		16		16			
				Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	1	1		1		1		1		1			

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
							2026		2027		2028		2029		2030			
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2	1	3		3		3		3		3			
			5.02.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					5.697.591,68		6.683.924,37		6.687.550,44		6.563.380,32		6.657.275,31		
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6	1	6	5.697.591,68	7	6.683.924,37	7	6.687.550,44	7	6.563.380,32	7	6.657.275,31		
			5.02.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					411.492.732,46		496.520.095,78		510.983.446,11		515.824.287,06		538.152.287,11		
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	45	37	36	411.492.732,46	38	496.520.095,78	40	510.983.446,11	42	515.824.287,06	44	538.152.287,11		
			5.02.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					34.818.615,82		40.846.204,46		40.868.363,82		40.109.546,37		40.683.349,12		
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	15	14	16	34.818.615,82	16	40.846.204,46	16	40.868.363,82	16	40.109.546,37	16	40.683.349,12		
			5.02.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					348.186.158,24		427.912.618,16		448.532.609,73		461.166.666,35		490.038.545,19		
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4	5	15	348.186.158,24	15	427.912.618,16	15	448.532.609,73	15	461.166.666,35	15	490.038.545,19		
			5.02.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					9.495.986,13		10.927.685,87		10.725.354,90		10.325.714,11		10.273.938,69		
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2	1	3	9.495.986,13	3	10.927.685,87	3	10.725.354,90	3	10.325.714,11	3	10.273.938,69		
			5.02.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					447.894.012,64		500.410.210,49		476.839.701,55		477.199.303,00		430.549.665,29		

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
							2026		2027		2028		2029		2030			
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	680	95	168	447.894.012,64	168	500.410.210,49	168	476.839.701,55	192	477.199.303,00	168	430.549.665,29		
			5.02.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					17.725.840,78		19.804.220,35		23.589.243,19		17.639.050,14		17.039.421,38		
			Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4	7	6	17.725.840,78	6	19.804.220,35	6	23.589.243,19	6	17.639.050,14	6	17.039.421,38		
			5.02.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					64.794.278,72		74.563.243,24		73.182.671,59		70.455.789,31		70.102.508,31		
			Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	1	1	64.794.278,72	1	74.563.243,24	1	73.182.671,59	1	70.455.789,31	1	70.102.508,31		
			5.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					1.740.930.791,19		1.485.316.525,85		1.415.354.591,16		2.236.379.571,83		1.277.956.603,69		
			Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	31	5	6	1.740.930.791,19	4	1.485.316.525,85	4	1.415.354.591,16	7	2.236.379.571,83	4	1.277.956.603,69		
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0	0	14		20		20		30		20			
			5.02.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					1.519.357.781,40		1.131.669.733,98		1.078.365.402,79		1.763.905.014,40		973.681.221,86		
			Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	31	5	6	1.519.357.781,40	4	1.131.669.733,98	4	1.078.365.402,79	7	1.763.905.014,40	4	973.681.221,86		
			5.02.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					221.573.009,79		353.646.791,87		336.989.188,37		472.474.557,43		304.275.381,83		
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0	0	14	221.573.009,79	20	353.646.791,87	20	336.989.188,37	30	472.474.557,43	20	304.275.381,83		
			5.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan					25.969.460.180,60		43.486.818.499,30		43.924.420.404,87		43.519.059.734,65		44.561.676.076,61		

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
							2026		2027		2028		2029		2030			
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Pemerintahan Daerah															
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	12	25.969.460.180,60	12	43.486.818.499,30	12	43.924.420.404,87	12	43.519.059.734,65	12	44.561.676.076,61		
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	12		12		12		12		12			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	17	42	12		12		12		12		12			
			5.02.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat					11.395.183,36		13.113.223,04		12.870.425,88		12.390.856,94		12.328.726,43		
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	17	42	12	11.395.183,36	12	13.113.223,04	12	12.870.425,88	12	12.390.856,94	12	12.328.726,43		
			5.02.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					25.829.082.283,72		43.286.367.324,64		43.722.325.256,29		43.319.188.878,53		44.357.374.215,49		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	12	25.829.082.283,72	12	43.286.367.324,64	12	43.722.325.256,29	12	43.319.188.878,53	12	44.357.374.215,49		
			5.02.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					128.982.713,52		187.337.951,62		189.224.722,70		187.479.999,18		191.973.134,69		
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	12	128.982.713,52	12	187.337.951,62	12	189.224.722,70	12	187.479.999,18	12	191.973.134,69		
			5.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					569.759.167,64		674.758.079,27		681.553.893,50		675.269.709,02		691.453.186,07		
			Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	78	81	79	569.759.167,64	79	674.758.079,27	79	681.553.893,50	79	675.269.709,02	79	691.453.186,07		
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	123	124	123		123		123		123		123			
			5.02.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan					506.452.593,80		599.784.959,01		605.825.683,29		600.239.741,32		614.625.054,49		

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
							2026		2027		2028		2029		2030			
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan															
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	78	81	79	506.452.593,80	79	599.784.959,01	79	605.825.683,29	79	600.239.741,32	79	614.625.054,49		
			5.02.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					63.306.573,84		74.973.120,26		75.728.210,21		75.029.967,70		76.828.131,58		
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	123	124	123	63.306.573,84	123	74.973.120,26	123	75.728.210,21	123	75.029.967,70	123	76.828.131,58		
			5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					385.924.772.273,00		361.648.134.209,00		363.611.063.334,00		363.077.182.440,00		365.552.233.499,00		
			Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan daerah	Rasio Belanja Pegawai terhadap total belanja	30.39	33,09	35.00	385.924.772.273,00	33.50	361.648.134.209,00	32.00	363.611.063.334,00	30.50	363.077.182.440,00	29.00	365.552.233.499,00	5.02.0.00.0.00.0 1.0000 - Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	
				Presentase alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik	12.16	29,63	30		30.5		31		31.5		32			
				Cash Management: Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	7.23	7,11	7.00		7.00		6.65		6.65		6.32			
			5.02.02.2.01 - Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah					748.624.834,32		764.366.042,81		782.829.371,90		795.317.051,97		798.820.204,75		
			Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2	2	2	748.624.834,32	2	764.366.042,81	2	782.829.371,90	2	795.317.051,97	2	798.820.204,75		
				Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	1	1	1		1		1		1		1			
				Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	1	1	1		1		1		1		1			

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
							2026		2027		2028		2029		2030			
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1	1	1		1		1		1		1			
				Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	396	396	396		400		400		400		400			
				Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2	2	2		2		2		2		2			
			5.02.02.2.01.0001 - Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS					65.259.948,20		84.976.769,63		87.258.051,01		88.772.070,74		90.864.810,63		
			Tersusunnya KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	1	1	1	65.259.948,20	1	84.976.769,63	1	87.258.051,01	1	88.772.070,74	1	90.864.810,63		
			5.02.02.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS					65.259.948,20		84.976.769,63		87.258.051,01		88.772.070,74		90.864.810,63		
			Tersusunnya Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	1	1	1	65.259.948,20	1	84.976.769,63	1	87.258.051,01	1	88.772.070,74	1	90.864.810,63		
			5.02.02.2.01.0005 - Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD					31.697.689,12		38.239.546,33		39.058.365,69		40.350.941,25		43.457.083,34		
			Terlaksananya Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	396	396	396	31.697.689,12	400	38.239.546,33	400	39.058.365,69	400	40.350.941,25	400	43.457.083,34		
			5.02.02.2.01.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD					326.299.740,98		314.414.047,63		324.101.332,31		330.877.718,22		323.952.803,11		
			Tersusunnya Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2	2	2	326.299.740,98	2	314.414.047,63	2	324.101.332,31	2	330.877.718,22	2	323.952.803,11		
			5.02.02.2.01.0008 - Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD					256.378.367,92		237.934.954,96		240.998.426,59		242.105.647,48		244.939.924,31		

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
							2026		2027		2028		2029		2030			
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2	2	2	256.378.367,9 ₂	2	237.934.954,9 ₆	2	240.998.426,5 ₉	2	242.105.647,4 ₈	2	244.939.924,3 ₁		
			5.02.02.2.01.0009 - Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran					3.729.139,90		3.823.954,63		4.155.145,29		4.438.603,54		4.740.772,73		
			Tersusunnya Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1	1	1	3.729.139,90	1	3.823.954,63	1	4.155.145,29	1	4.438.603,54	1	4.740.772,73		
			5.02.02.2.02 - Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah					2.151.740.756,81		2.155.547.846,01		2.317.735.960,21		2.474.638.166,01		2.663.788.094,18		
			Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	0	0	12	2.151.740.756,81	12	2.155.547.846,01	12	2.317.735.960,21	12	2.474.638.166,01	12	2.663.788.094,18		
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	15	15	14		14		14		14		14			

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
							2026		2027		2028		2029		2030			
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	452	452	452		260		260		260		260			
				Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	42	42	42		42		42		42		42			
				Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	140	140	438		438		438		438		438			
				Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawab an Sub Kegiatan	1	1	1		1		1		1		1			
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	64	64	64		64		64		64		64			
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	88	88	88		88		88		88		88			
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	0	0	3		3		3		3		3			
			5.02.02.2.02.0001 - Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah					298.331.191,76		299.118.229,10		321.774.450,95		343.725.457,91		370.184.818,76		

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
							2026		2027		2028		2029		2030			
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	64	64	64	298.331.191,76	64	299.118.229,10	64	321.774.450,95	64	343.725.457,91	64	370.184.818,76		
			5.02.02.2.02.0003 - Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD					29.833.119,18		28.042.333,98		29.086.017,00		29.859.696,52		30.815.022,74		
			Terlaksananya Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	452	452	452	29.833.119,18	260	28.042.333,98	260	29.086.017,00	260	29.859.696,52	260	30.815.022,74		
			5.02.02.2.02.0005 - Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya					29.833.119,18		29.911.822,91		32.177.445,10		34.372.545,79		37.018.481,88		
			Terlaksananya Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	88	88	88	29.833.119,18	88	29.911.822,91	88	32.177.445,10	88	34.372.545,79	88	37.018.481,88		
			5.02.02.2.02.0006 - Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank					372.913.989,70		373.897.786,37		402.218.063,69		429.656.822,39		462.731.023,45		
			Terlaksananya Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	0	0	3	372.913.989,70	3	373.897.786,37	3	402.218.063,69	3	429.656.822,39	3	462.731.023,45		

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
							2026		2027		2028		2029		2030			
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			5.02.02.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)					167.811.295,3 ₆		168.254.003,8 ₇		180.998.128,6 ₆		193.345.570,0 ₇		208.228.960,55		
			Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	0	0	12	167.811.295,3 ₆	12	168.254.003,8 ₇	12	180.998.128,6 ₆	12	193.345.570,0 ₇	12	208.228.960,55		
			5.02.02.2.02.0008 - Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas					266.194.396,4 ₁		266.896.652,6 ₁		287.112.303,7 ₇		306.698.707,1 ₀		330.307.815,99		
			Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang	15	15	14	266.194.396,4 ₁	14	266.896.652,6 ₁	14	287.112.303,7 ₇	14	306.698.707,1 ₀	14	330.307.815,99		

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
							2026		2027		2028		2029		2030			
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Daerah sebagai Optimalisasi Kas														
			5.02.02.2.02.0009 - Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait					442.835.362,76		444.003.621,31		477.633.950,63		510.217.476,58		549.493.090,35		
			Terlaksananya Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	42	42	42	442.835.362,76	42	444.003.621,31	42	477.633.950,63	42	510.217.476,58	42	549.493.090,35		
			5.02.02.2.02.0010 - Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawab an Sub Kegiatan					220.951.538,89		221.534.438,42		238.314.202,74		254.571.667,26		274.168.131,40		
			Tersedianya Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawab an Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawab an Sub Kegiatan	1	1	1	220.951.538,89	1	221.534.438,42	1	238.314.202,74	1	254.571.667,26	1	274.168.131,40		
			5.02.02.2.02.0011 - Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota					323.036.743,57		323.888.957,44		348.421.397,67		372.190.222,39		400.840.749,06		
			Terlaksananya Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	140	140	438	323.036.743,57	438	323.888.957,44	438	348.421.397,67	438	372.190.222,39	438	400.840.749,06		
			5.02.02.2.03 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah					744.476.166,19		741.571.024,37		792.644.988,51		841.423.863,71		900.648.836,86		

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
							2026		2027		2028		2029		2030			
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1	1	1	744.476.166,1 ₉	1	741.571.024,3 ₇	1	792.644.988,5 ₁	1	841.423.863,7 ₁	1	900.648.836,8 ₆		
				Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	649	649	649		649		649		649		649			
				Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	12	12	12		12		12		12		12			
				Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawab an Pemerintah Kabupaten/Kota	52	52	52		52		52		52		52			
				Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	2	2	2		2		2		2		2			
				Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2	2	2		2		2		2		2			
				Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1	1	1		1		1		1		1			

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
							2026		2027		2028		2029		2030			
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	0	0	31		31		31		31		31			
			5.02.02.2.03.0001 - Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah					111.874.196,9 ₁		112.169.335,9 ₁		120.665.419,1 ₁		128.897.046,7 ₂		138.819.307,04		
			Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	649	649	649	111.874.196,9 ₁	649	112.169.335,9 ₁	649	120.665.419,1 ₁	649	128.897.046,7 ₂	649	138.819.307,04		
			5.02.02.2.03.0002 - Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban					22.374.839,38		22.433.867,18		24.133.083,82		25.779.409,34		27.763.861,4 ₁		
			Terlaksananya Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	2	2	2	22.374.839,38	2	22.433.867,18	2	24.133.083,82	2	25.779.409,34	2	27.763.861,4 ₁		
			5.02.02.2.03.0004 - Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah					35.939.585,76		36.034.399,16		38.763.765,89		41.408.176,26		44.595.702,3 ₉		
			Terlaksananya Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	12	12	12	35.939.585,76	12	36.034.399,16	12	38.763.765,89	12	41.408.176,26	12	44.595.702,3 ₉		
			5.02.02.2.03.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran					372.913.989,7 ₀		373.897.786,3 ₇		402.218.063,6 ₉		429.656.822,3 ₉		462.731.023,45		

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
							2026		2027		2028		2029		2030			
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota															
			Tersedianya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2	2	2	372.913.989,70	2	373.897.786,37	2	402.218.063,69	2	429.656.822,39	2	462.731.023,45		
			5.02.02.2.03.0009 - Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah					13.051.989,64		12.729.520,09		13.320.232,35		13.840.858,67		14.499.767,28		
			Tersedianya Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1	1	1	13.051.989,64	1	12.729.520,09	1	13.320.232,35	1	13.840.858,67	1	14.499.767,28		
			5.02.02.2.03.0010 - Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah					25.171.694,30		24.549.788,75		25.689.019,53		26.693.084,58		27.963.836,90		
			Tersedianya Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1	1	1	25.171.694,30	1	24.549.788,75	1	25.689.019,53	1	26.693.084,58	1	27.963.836,90		
			5.02.02.2.03.0011 - Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan					139.842.746,14		136.387.715,26		142.716.775,14		148.294.914,35		155.354.649,42		
			Pertanggungjawab an Pemerintah Kabupaten/ Kota															
			Terlaksananya Pembinaan Akuntansi,	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan	52	52	52	139.842.746,14	52	136.387.715,26	52	142.716.775,14	52	148.294.914,35	52	155.354.649,42		

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
							2026		2027		2028		2029		2030			
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Pelaporan dan Pertanggungjawab an Pemerintah Kabupaten/Kota	Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawab an Pemerintah Kabupaten/Kota														
			5.02.02.2.03.0012 - Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota					23.307.124,36		23.368.611,65		25.138.628,98		26.853.551,40		28.920.688,97		
			Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	0	0	31	23.307.124,36	31	23.368.611,65	31	25.138.628,98	31	26.853.551,40	31	28.920.688,97		
			5.02.02.2.04 - Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah					382.279.930.515,68		357.986.649.295,81		359.717.853.013,38		358.965.803.358,31		361.188.976.363,21		
			Terlaksananya Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	640	78	78	382.279.930.515,68	78	357.986.649.295,81	78	359.717.853.013,38	78	358.965.803.358,31	78	361.188.976.363,21		
				Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	75	75	75		75		75		75		75			
				Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1	1	1		1		1		1		1			
			5.02.02.2.04.0008 - Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan					299.662.077.063,14		281.332.912.926,56		283.382.977.729,39		283.451.291.593,80		285.844.529.457,81		
			Tersedianya Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	640	78	78	299.662.077.063,14	78	281.332.912.926,56	78	283.382.977.729,39	78	283.451.291.593,80	78	285.844.529.457,81		
			5.02.02.2.04.0009 - Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak					45.632.932.726,53		41.593.925.880,82		40.676.718.073,97		39.501.479.444,75		38.674.755.925,63		
			Terkelolanya Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1	1	1	45.632.932.726,53	1	41.593.925.880,82	1	40.676.718.073,97	1	39.501.479.444,75	1	38.674.755.925,63		
			5.02.02.2.04.0010 - Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota					36.984.920.726,01		35.059.810.488,43		35.658.157.210,02		36.013.032.319,76		36.669.690.979,77		
			Terkelolanya Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	75	75	75	36.984.920.726,01	75	35.059.810.488,43	75	35.658.157.210,02	75	36.013.032.319,76	75	36.669.690.979,77		
			5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN					995.859.431,00		1.391.795.355,00		1.399.349.647,00		1.397.295.017,00		1.406.820.200,00		

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
							2026		2027		2028		2029		2030			
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			BARANG MILIK DAERAH															
			Meningkatnya kualitas tata kelola barang milik daerah	Persentase akurasi data barang milik daerah dalam rangka assets management	65	65,5	66.00	995.859.431,00	69.00	1.391.795.355,00	72.60	1.399.349.647,00	76.00	1.397.295.017,00	79.00	1.406.820.200,00	5.02.0.00.0.00.01.0000 - Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	
			5.02.03.2.01 - Pengelolaan Barang Milik Daerah					995.859.431,00		1.391.795.355,00		1.399.349.646,00		1.397.295.017,00		1.406.820.200,00		
			Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	215	221	58	995.859.431,00	215	1.391.795.355,00	215	1.399.349.647,00	215	1.397.295.017,00	215	1.406.820.200,00		
				Jumlah Standar Harga yang Disusun	4	4	2		2		2		2		2			
				Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	120	120	120		120		120		120		120			
				Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	52	52	52		56		56		56		56			
				Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1	1	1		1		1		1		1			
				Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	11	11	11		11		11		11		11			
				Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1610	1622	1622		1		1		1		1			
				Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	2	2	4		4		4		4		4			
				Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	16	16	16		16		16		16		16			
				Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	0	1	1		1		1		1		1			
			5.02.03.2.01.0001 - Penyusunan Standar Harga					151.963.841,00		221.227.158,00		222.272.050,00		228.903.557,00		230.304.549,00		

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
							2026		2027		2028		2029		2030			
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Tersedianya Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	4	4	2	151.963.841,00	2	221.227.158,00	2	222.272.050,00	2	228.903.557,00	2	230.304.549,00		
			5.02.03.2.01.0003 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah					8.172.684,00		4.570.943,00		4.592.534,00		4.529.711,00		4.557.435,00		
			Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	120	120	120	8.172.684,00	120	4.570.943,00	120	4.592.534,00	120	4.529.711,00	120	4.557.435,00		
			5.02.03.2.01.0004 - Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah					40.863.418,00		32.533.406,00		32.687.066,00		32.239.938,00		32.437.260,00		
			Tersedianya Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	0	1	1	40.863.418,00	1	32.533.406,00	1	32.687.066,00	1	32.239.938,00	1	32.437.260,00		
			5.02.03.2.01.0005 - Penatausahaan Barang Milik Daerah					173.068.594,00		260.267.244,00		261.496.529,00		257.919.501,00		259.498.083,00		
			Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	52	52	52	173.068.594,00	56	260.267.244,00	56	261.496.529,00	56	257.919.501,00	56	259.498.083,00		
			5.02.03.2.01.0006 - Inventarisasi Barang Milik Daerah					159.313.151,00		221.227.158,00		222.272.050,00		225.679.563,00		227.060.822,00		
			Terlaksananya Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	2	2	4	159.313.151,00	4	221.227.158,00	4	222.272.050,00	4	225.679.563,00	4	227.060.822,00		
			5.02.03.2.01.0007 - Pengamanan Barang Milik Daerah					34.613.719,00		7.808.017,00		8.825.508,00		9.671.981,00		10.704.296,00		
			Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1610	1622	1622	34.613.719,00	1	7.808.017,00	1	8.825.508,00	1	9.671.981,00	1	10.704.296,00		
			5.02.03.2.01.0008 - Penilaian Barang Milik Daerah					36.055.957,00		48.800.108,00		49.030.599,00		48.359.906,00		48.655.891,00		
			Terlaksananya Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1	1	1	36.055.957,00	1	48.800.108,00	1	49.030.599,00	1	48.359.906,00	1	48.655.891,00		
			5.02.03.2.01.0009 - Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan					108.167.871,00		211.467.136,00		212.465.930,00		209.559.595,00		210.842.192,00		

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
							2026		2027		2028		2029		2030			
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Barang Milik Daerah															
			Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	11	11	11	108.167.871,00	11	211.467.136,00	11	212.465.930,00	11	209.559.595,00	11	210.842.192,00		
			5.02.03.2.01.0012 - Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah					187.490.977,00		253.760.563,00		254.959.116,00		251.471.514,00		253.010.631,00		
			Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	16	16	16	187.490.977,00	16	253.760.563,00	16	254.959.116,00	16	251.471.514,00	16	253.010.631,00		
			5.02.03.2.01.0013 - Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota					96.149.219,00		130.133.622,00		130.748.265,00		128.959.751,00		129.749.041,00		
			Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	215	221	58	96.149.219,00	215	130.133.622,00	215	130.748.265,00	215	128.959.751,00	215	129.749.041,00		
			5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					7.569.890.388,00		10.579.543.607,00		10.636.966.534,00		10.621.348.546,00		10.693.752.930,00		
			Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan	Persentase data piutang pajak daerah yang tertagih	78	78,25	78.50	7.569.890.388,00	78.75	10.579.543.607,00	79	10.636.966.534,00	79.50	10.621.348.546,00	80	10.693.752.930,00	5.02.0.00.0.00.0 1.0000 - Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	
				Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	10.75	10,76	10.79		10.84		10.89		10.92		10.96			
			5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					7.569.890.388,00		10.579.543.607,00		10.636.966.534,00		10.621.348.546,00		10.693.752.930,00		
			Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	2	2	3	7.569.890.388,00	3	10.579.543.607,00	3	10.636.966.534,00	3	10.621.348.546,00	3	10.693.752.930,00		
				Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	12	12	12		12		12		12		12			

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
							2026		2027		2028		2029		2030			
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	2	2	2		3		3		3		4			
				Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	12	12	635100		635200		635300		635400		635500			
				Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	2	12	3		3		3		4		4			
				Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	12	12	645		640		635		630		625			
				Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	12	12	12		12		12		12		12			
				Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	12	12	12		12		12		12		12			
				Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12	12	12		12		12		12		12			
				Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	4	4	4		4		4		4		4			
				Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	0	0	3		3		3		3		3			
				Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	9	7	7		7		7		7		7			
				Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	15	12	24		30		35		40		40			
				Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	11	27	11		11		11		11		11			
			5.02.04.2.01.0002 - Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan					1.379.222.812,69		1.880.982.809,16		1.860.785.238,07		1.813.020.390,87		1.778.769.858,28		

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
							2026		2027		2028		2029		2030			
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Kebijakan Pajak Daerah															
			Tersedianya Hasil Analis Pajak Daerah serta Terlaksananya Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	2	2	2	1.379.222.812,69	3	1.880.982.809,16	3	1.860.785.238,07	3	1.813.020.390,87	4	1.778.769.858,28		
			5.02.04.2.01.0003 - Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah					612.104.648,86		834.787.759,69		825.823.996,15		804.625.764,44		789.425.239,53		
			Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	4	4	4	612.104.648,86	4	834.787.759,69	4	825.823.996,15	4	804.625.764,44	4	789.425.239,53		
			5.02.04.2.01.0004 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah					1.552.444.775,88		2.117.222.763,97		2.094.488.501,28		2.040.724.680,93		2.002.172.490,37		
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	11	27	11	1.552.444.775,88	11	2.117.222.763,97	11	2.094.488.501,28	11	2.040.724.680,93	11	2.002.172.490,37		
			5.02.04.2.01.0005 - Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah					526.379.919,17		745.562.802,52		765.389.460,55		788.766.141,83		818.511.298,99		
			Tersedianya Data Objek Pajak, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12	12	12	526.379.919,17	12	745.562.802,52	12	765.389.460,55	12	788.766.141,83	12	818.511.298,99		
			5.02.04.2.01.0006 - Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah					241.705.064,92		372.289.199,47		382.189.439,43		393.862.347,37		408.715.288,94		
			Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	2	2	3	241.705.064,92	3	372.289.199,47	3	382.189.439,43	3	393.862.347,37	3	408.715.288,94		
			5.02.04.2.01.0007 - Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)					29.541.730,16		45.772.371,69		46.989.590,62		48.424.756,30		50.250.902,11		

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
							2026		2027		2028		2029		2030			
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Terpenuhinya Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	15	12	24	29.541.730,16	30	45.772.371,69	35	46.989.590,62	40	48.424.756,30	40	50.250.902,11		
			5.02.04.2.01.0008 - Penetapan Wajib Pajak Daerah					1.226.081.443,10		1.768.597.715,85		1.815.629.812,94		1.871.083.149,63		1.941.643.559,61		
			Tersedianya Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	12	12	12	1.226.081.443,10	12	1.768.597.715,85	12	1.815.629.812,94	12	1.871.083.149,63	12	1.941.643.559,61		
			5.02.04.2.01.0009 - Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah					893.843.141,06		1.289.350.676,10		1.323.638.216,81		1.364.065.045,66		1.415.505.297,72		
			Tersedianya Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	9	7	7	893.843.141,06	7	1.289.350.676,10	7	1.323.638.216,81	7	1.364.065.045,66	7	1.415.505.297,72		
			5.02.04.2.01.0010 - Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah					187.992.828,27		271.175.857,49		278.387.203,03		286.889.761,86		297.708.660,65		
			Terlaksananya Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	12	12	12	187.992.828,27	12	271.175.857,49	12	278.387.203,03	12	286.889.761,86	12	297.708.660,65		
			5.02.04.2.01.0011 - Penagihan Pajak Daerah					587.343.307,76		801.018.265,37		792.417.111,08		772.076.406,76		757.490.785,86		
			Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	12	12	635100	587.343.307,76	635200	801.018.265,37	635300	792.417.111,08	635400	772.076.406,76	635500	757.490.785,86		
			5.02.04.2.01.0012 - Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah					62.037.633,33		84.606.867,54		83.698.377,99		81.549.908,53		80.009.315,11		
			Terlaksananya Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	12	12	645	62.037.633,33	640	84.606.867,54	635	83.698.377,99	630	81.549.908,53	625	80.009.315,11		
			5.02.04.2.01.0013 - Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah					205.664.154,13		280.484.585,10		277.472.804,60		270.350.302,59		265.243.001,22		
			Terlaksannanya Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	2	12	3	205.664.154,13	3	280.484.585,10	3	277.472.804,60	4	270.350.302,59	4	265.243.001,22		
			5.02.04.2.01.0014 - Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah					38.672.810,39		52.474.289,31		50.615.855,10		48.959.399,09		47.639.427,78		

SASARAN RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	TUJUAN PD	SASARAN PD	BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	REALISASI TAHUN 2024	BASELINE TAHUN 2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
							2026		2027		2028		2029		2030			
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Retribusi Daerah	12	12	12	38.672.810,39	12	52.474.289,31	12	50.615.855,10	12	48.959.399,09	12	47.639.427,78		
			5.02.04.2.01.0015 - Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah					26.856.118,28		35.217.643,74		39.440.926,35		36.950.490,14		40.667.803,83		
			Terlaksananya Upaya Mengubah Transaksi Tunai Menjadi Non Tunai	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	0	0	3	26.856.118,28	3	35.217.643,74	3	39.440.926,35	3	36.950.490,14	3	40.667.803,83		

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah setiap tahun melakukan Analisa gender untuk menyusun Perencanaan Responsif Gender yang diharapkan dapat terjadi sinergi dan terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Dalam melakukan analisis gender Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah menggunakan metode alur kerja *Gender Analysis Pathway (GAP)*. Hasil analisis gender tersebut dituangkan dalam penyusunan *Gender Budget Statement (GBS)* yaitu dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan atau suatu anggaran telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender. Hasil analisis gender yang terdapat dalam GAP dan GBS menjadi dasar Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen RKA/DPA Perangkat Daerah.

Setiap Badan Publik termasuk Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana sesuai Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penyelenggaraan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai upaya meningkatkan *public trust* dan partisipasi publik masyarakat Bantul dalam pembangunan melalui terimplementasikannya keterbukaan dan pelayanan informasi publik pada penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bantul.

Proses monitoring dan evaluasi (monev) layanan informasi publik Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik. Aspek yang dinilai dalam proses monitoring dan evaluasi tersebut terdiri atas 6 (enam) komponen indikator yaitu: sarana prasarana; kualitas Informasi; jenis informasi; komitmen organisasi; inovasi dan strategi; dan digitalisasi. Adapun pelaksanaan monitoring dan evaluasi Badan Publik di Pemerintah Kabupaten Bantul dilaksanakan oleh Komisi Informasi Daerah DIY

Tabel 4.2

**Daftar Subkegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas
Pembangunan Daerah**

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	MENINGKATNYA UPAYA EKSTENSIFIKASI DAN INTENSIFIKASI PENDAPATAN	KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	
			Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	
			Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	
			Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	
			Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	
			Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	
			Penetapan Wajib Pajak Daerah	
			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	
			Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	
			Penagihan Pajak Daerah	
			Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	
			Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	
			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	
			Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	

Sumber : SIPD

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Urusan

Tabel 4.3 Indikator Kinerja Utama (IKU) PD

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	5.02.0.00.0.00.01.0000 - Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah									
2.	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun N-1	Indeks	75,139	75,214	75,364	75,515	75,742	75,969	76,197	
3.	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	0,81	0.90-0.96	0.91-0.97	0.92-0.98	0.93-0.99	0.94-1.00	0.95-1.01	
4.	Persentase pengelolaan keuangan yang sesuai peraturan yang berlaku	%	95,21	95,27	95,32	95,38	95,42	95,47	95,5	
5.	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persentase	24,47	24,54	25,11	25,69	26,02	26,36	26,7	
6.	Persentase akuntabilitas pengelolaan Barang Milik Daerah	%	81,25	82	83	84,66	86,35	88,08	89,84	

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Kunci (IKK)

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN 2025	KETERANGAN					Ket
					2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	5.02 - KEUANGAN									
2	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	Persen (%)	0.210	0.115	0.113	0.110	0.108	0.106	0.104	
3	Rasio Belanja Pegawai di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	Persen (%)	24.07	36.42	36.20	35.98	35.76	35.54	35.32	
4	Rasio Belanja Urusan pemerintahan Umum (Dikurangi transfer expenditures)	Persen (%)	71.30	70.29	70.08	69.87	69.66	69.45	69.24	
5	Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	Persen (%)	10.75	10.37	10.00	10.25	10.51	10.77	11.04	
6	Manajemen Aset	Kategori	4	4	4	4	4	4	4	
7	Cash Management: Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	Persen (%)	7.23	7.11	7.00	7.00	6.65	6.65	6.32	

BAB V

PENUTUP

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029. Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 diarahkan untuk mendukung visi pembangunan daerah **“Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera dalam Bingkai Keberagamaan dan Budaya Istimewa”**.

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026, 2027, 2028, 2029 dan 2030. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030 akan dilakukan bersamaan dengan penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2030-2034 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030 akan memedomani perencanaan yang termuat dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, serta mengacu pada RKPD Tahun 2030 yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029 dan berdasarkan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Bantul 2025-2045 sesuai periode/tahapan kedua (2030-2034).

Pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 diharapkan dapat didukung oleh seluruh pemangku kepentingan. Sinergi yang baik antara perangkat daerah, kelompok masyarakat dan dunia usaha diharapkan dapat mewujudkan visi pembangunan daerah.

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

*Perangkat Daerah
Tahun 2025 – 2029*



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

Komplek Parasamya Jl. RW Monginsidi No.1 Bantul 55711